

**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, UPAH
MINIMUM KOTA-KABUPATEN DAN INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

TAHUN 2010-2014

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Dytto Adenata Putra

125020100111087



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, UPAH MINIMUM
KOTA-KABUPATEN DAN INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2014**

Yang disusun oleh :

Nama : Dytto Adenat Putra

NIM : 1250201001111087

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan
Dewan Penguji pada tanggal

Malang,

Dosen Pembimbing,

Dr. Susilo SE., MS.

NIP. 19601030 198601 1 001

ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, UPAH MINIMUM KOTA-KABUPATEN DAN INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2014

Dytto Adenata Putra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: boozdit@gmail.com

ABSTRAK

Pengangguran merupakan masalah yang selalu dihadapi dalam perekonomian, pengangguran ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Masalah pengangguran sangat penting karena adanya pengangguran dapat menimbulkan masalah sosial termasuk masalah sosial dengan motif ekonomi. Dari segi kebijakan makro yang perlu diperhatikan adalah produk domestik regional bruto, upah minimum kota-kabupaten dan indek pembangunan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh domestik regional bruto, upah minimum kota-kabupaten dan indek pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran kota/kabupaten di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data panel selama lima tahun antara tahun 2010-2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menggunakan *fixed effect model* menunjukkan bahwa variabel produk domestik regional bruto dan indek pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di kota/kabupaten di Jawa Timur, sedangkan upah minimum kota-kabupaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran kota/kabupaten di Jawa Timur.

Kata Kunci: Produk domestik regional bruto, Upah Minimum Kota-kabupaten, Indek Pembangunan Manusia dan Pengangguran

A. PENDAHULUAN

Menurut Sukirno dalam Ruliansyah (2013) bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

Istilah Pengangguran menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan. Masalah pengangguran memang merupakan masalah yang sulit dipecahkan hingga saat ini. Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya mengakibatkan jumlah angkatan kerja meningkat namun tidak disertai dengan meningkatnya kesempatan kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa angka pengangguran sudah berkurang, namun jumlah angka pengangguran yang ada masih cukup besar yaitu sebesar 7.429.598 juta jiwa. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah pengangguran. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transportasi (Kemenakertrans) adalah dengan memfasilitasi perluasan dan kesempatan kerja, melalui pemagangan dalam negeri dan luar negeri, program padat karya produktif, padat karya inovatif dan wirausaha baru. Masalah pengangguran terdapat di hampir seluruh provinsi di kepulauan Indonesia. Hal itu pun terjadi pula di beberapa Provinsi di Pulau Jawa diantaranya Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, dan Jawa Timur. Berikut tabel prosentase tingkat pengangguran di 6 Provinsi di Pulau Jawa:

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
DKI JAKARTA	11.05 %	11.69 %	9.67 %	8.63 %	8.47 %
JAWA BARAT	10.33 %	9.96 %	9.04 %	9.16 %	8.40 %
JAWA TENGAH	6.21 %	7.07 %	5.90 %	6.01 %	5.68 %
DI YOGYAKARTA	5.69 %	4.39 %	3.98 %	3.24 %	3.33 %
JAWA TIMUR	4.65 %	5.38 %	4.26 %	4.10 %	4.01%
BANTEN	13.68 %	13.74 %	9.94 %	9.54 %	9.07 %

Tabel 1.1 Prosentase Tingkat pengangguran di 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010 – 2014

Sumber: BPS 2016 (diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat pada provinsi Jawa Timur dapat dilihat juga prosentasi kemiskinan dari tahun 2010-2014 selalu berfluktuasi tetapi cenderung turun. Tetapi diantara 6 provinsi di pulau Jawa, pada provinsi Jawa Timur memiliki tingkat pengangguran paling rendah setelah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. PDRB merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai tingkat kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Roby, 2011). Pada kenyataannya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB suatu wilayah meningkat, maka jumlah output dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan menurun. Output yang jumlahnya menurun akan menyebabkan terjadinya penurunan permintaan tenaga kerja. Berikut merupakan perbandingan jumlah nilai PDRB dari 6 Provinsi di Pulau Jawa.

Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi Tahun 2010-2013 (Milyar Rupiah)

Provinsi	2010	2011	2012	2013
DKI JAKARTA	395.622,44	422.242,25	449.805,42	477.285,25
JAWA BARAT	322.223,82	343.193,56	364.752,40	386.838,84
JAWA TENGAH	186.992,99	198.270,12	210.848,42	223.099,74
YOGYAKARTA	21.044,04	22.131,77	233.08,56	24.567,48
JAWA TIMUR	342.280,76	366.983,28	393.662,85	419.428,45
BANTEN	88.552,19	941.98,17	99.992,41	105.856,07

Sumber: BPS 2016 (diolah)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa PDRB di 6 Provinsi di Pulau Jawa terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2013. Pada provinsi Jawa Timur PDRB terus mengalami tren meningkat, nilai PDRB di Provinsi Jawa Timur termasuk dalam PDRB tertinggi kedua setelah Provinsi D.K.I Jakarta. Peningkatan nilai PDRB yang terjadi di Provinsi Jawa Timur belum selaras terhadap berkurangnya tingkat pengangguran di Provinsi tersebut, karena data pengangguran di provinsi Jawa Timur cenderung konstan dari tahun 2010 - 2013. Tetapi dengan jumlah PDRB sebesar 41 triliun pada tahun 2013, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur masih terbilang cukup rendah yakni sebesar 4.30 pada tahun 2012.

Selain nilai PDRB suatu wilayah, tingkat upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Menurut (Alghofari, 2010) setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Begitu pula sebaliknya apabila tingkat upah turun maka akan diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap mempunyai hubungantimbal balik dengan tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka biaya produksi juga semakin meningkat. Sehingga dilakukanlah efisiensi oleh perusahaan dengan cara pengurangan tenaga kerja dan berakibat pada meningkatnya pengangguran. Berikut ini merupakan tingkat UMK di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.3 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota di 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014 (Dalam Ribuan Rupiah)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
DKI JAKARTA	1060000	1118000	1290000	1500000	2200000
JAWA BARAT	671500	732000	780000	850000	1000000
JAWA TENGAH	660000	675000	765000	830000	910000
DI YOGYAKARTA	745000	808000	892660	940000	988500
JAWA TIMUR	630000	705000	745000	866250	1000000
BANTEN	955300	1000000	1042000	1170000	1325000

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan upah minimum pada setiap Provinsi di Pulau Jawa. Hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui besarnya PDRB di setiap Provinsi. Dengan meningkatnya tingkat upah minimum Kabupaten/Kota akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dimasa yang akan datang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan cenderung turunnya tingkat pengangguran di setiap Provinsi di Jawa.

Sementara itu pembangunan suatu daerah juga dapat dilihat melalui besaran nilai indeks pembangunan manusia (IPM). Tinggi rendahnya nilai IPM juga menentukan kualitas dari sumber daya manusia di suatu wilayah. Menurut Todaro (1999) dalam jurnal Muhammad Shun (2013), pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah Negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Berikut ini merupakan tabel perbandingan jumlah indeks pembangunan manusia di 6 Provinsi di Pulau Jawa:

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia di 6 Provinsi di Pulau Jawa 2010-2014

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
DKI JAKARTA	76.31	76.98	77.53	78.08	78.39
JAWA BARAT	66.15	66.67	67.32	68.25	68.80
JAWA TENGAH	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78
DI YOGYAKARTA	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81
JAWA TIMUR	65.36	66.06	66.74	67.55	68.14
BANTEN	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89

Sumber : BPS 2016 (diolah)

Dari tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa nilai IPM secara keseluruhan mengalami peningkatan di setiap Provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2010 sampai 2014. Meskipun mengalami tren meningkat, namun nilai indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur masih kalah dengan provinsi seperti Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, D.i Yogyakarta dan D.K.I Jakarta. Hal ini menunjukka bahwa kualitas SDM di Provinsi Jawa Timur belum di katakan baik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif untuk mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1997).

Menurut Sukirno (1977) dalam skripsi Cholili (2014), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.

Sedangkan dalam ilmu kependudukan (demografi), orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan kategori usia, usia angkatan kerja adalah 15-64 tahun. Tetapi tidak semua penduduk yang berusia 15-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja. Yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk berusia 15-64 tahun yang bekerja dan sedang mencari kerja. Tingkat pengangguran merupakan presentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan (Rahardja, 2008)

Menurut Sukirno (1997), pengangguran dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
3. Pengangguran kongjungtor, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengangguran dalam permintaan agregat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Sukirno dalam Ruliansyah (2013) bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2004) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Menurut departemen statistik ekonomi dan moneter dari Bank Indonesia, PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Upah Minimum Kota/Kabupaten

Didalam Sistem Ricardo, upah memainkan peranan aktif dalam menentukan pendapatan modal dengan buruh. Tingkat upah meningkat bila harga barang yang dibutuhkan buruh meningkat. Barang yang diproduksi buruh sebagian besar adalah hasil pertanian. Karena itu untuk menghasilkan satu unit produk dibutuhkan buruh lebih banyak. Sehingga apabila permintaan terhadap buruh mulai meningkat maka akan menaikkan upah (Jhingan, 2012).

Menurut Mill, elastisitas penawaran tenaga kerja sangat tinggi dalam menanggapi kenaikan upah. Upah pada umumnya melebihi tingkat penghidupan minimum. Upah dapat naik karena peningkatan cadangan modal yang berputar dengan penduduk yang dipakai untuk mengupah tenaga kerja atau karena pengurangan jumlah tenaga kerja. Jika upah naik, penawaran tenaga kerja akan naik. Persaingan antara pekerja tidak hanya akan menurunkan upah tetapi juga sebagian buruh akan kehilangan pekerjaan. (Jhingan, 2012).

Menurut teori upah efisiensi, perusahaan bersedia membayar lebih tinggi daripada gaji ekuilibrium agar mendorong para pekerja untuk menghindari kelalaian atau mengulur-ngulur waktu kerja. (Schaum's 2006). Mankiw (2006) dalam skripsi Anggrainy (2013) menjelaskan bahwa teori upah-efisiensi mengajukan penyebab ketiga dari kekakuan upah selain undang-undang upah minimum dan pembentukan serikat pekerja. Teori upah-efisiensi yang pertama menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Pengaruh upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Pengaruh upah efisiensi pekerja dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memangkas upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Meskipun akan mengurangi tagihan upah perusahaan, (jika teori ini benar) maka pengurangan upah akan memperendah produktivitas pekerja dan laba perusahaan.

Teori upah-efisiensi yang kedua, menyatakan bahwa upah yang tinggi menurunkan perputaran tenaga kerja. Dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan membagi frekuensi pekerja yang keluar dari pekerjaan, sekaligus mengurangi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menarik dan melatih pekerja baru. Teori upah-efisiensi yang ketiga menyatakan bahwa kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayar kepada karyawannya, jika perusahaan mengurangi upahnya, maka pekerja terbaik bias mengambil pekerjaan ditempat lain meninggalkan perusahaan ditempat lain meninggalkan perusahaan dengan pekerja yang tidak terdidik yang memiliki lebih sedikit alternatif. Teori upah-efisiensi yang keempat menyatakan bahwa upah yang tinggi meningkatkan upaya pekerja. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat memantap dengan sempurna upaya para pekerja, dan para pekerja harus memutuskan sendiri sejauh mana mereka akan bekerja keras. Semakin tinggi upah, semakin besar kerugian bagi pekerja bila mereka sampai dipecat. Dengan membayar upah yang lebih tinggi, perusahaan memotivasi lebih banyak pekerja agar tidak bermalas malasan dan dengan demikian meningkatkan produktivitas mereka.

Teori upah subsistensi (hukum besi) oleh David Ricardo (1772-1823) yaitu upah ditentukan oleh interaksi penyediaan dan permintaan akan buruh. Lebih lanjut berargumentasi bahwa bila pendapatan penduduk bertambah diatas tingkat subsisten. Maka penduduk akan bertambah lebih cepat dari laju pertumbuhan makanan dan kebutuhan lain. Angkatan kerja bertambah maka akan bertambah pula angkatan kerja yang memasuki pasar kerja dan mencari kerja. Penawaran tenaga kerja menjadi lebih besar dari permintaan. Teori upah besi adalah upah riil dalam jangka panjang cenderung terhadap upah minimum yang diperlukan untuk menyokong kehidupan pekerja. Upah tidak dapat jatuh dibawah tingkat subsistensi karena tanpa subsisten, buruh tidak akan mampu bekerja. Teori iron wage ini cenderung merugikan kepentingan pengusaha dan pekerja yang belum

mendapatkan pekerjaan. Kenaikan upah akan menurunkan permintaan tenaga kerja sehingga para penganggur akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan dan para pengusaha akan disulitkan dengan kenaikan biaya produksi. Kegagalan upah dalam melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya merupakan indikasi adanya kekakuan upah (Wage Rigidity). (Devi, 2011).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP indeks pembangunan manusia memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia diantaranya: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi), dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan) (UNDP, 2004).

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara termasuk kategori Negara maju, Negara berkembang Negara terbelakang. Selain itu indeks ini juga menjadi parameter untuk melihat pengaruh kebijakan ekonomi suatu Negara terhadap kualitas rakyatnya. Dan tidak hanya digunakan sebagai tolak ukur pengelompokan suatu Negara tetapi juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur dan pengelompokan Subnegara (daerah/bagian) (Cholili, 2014)

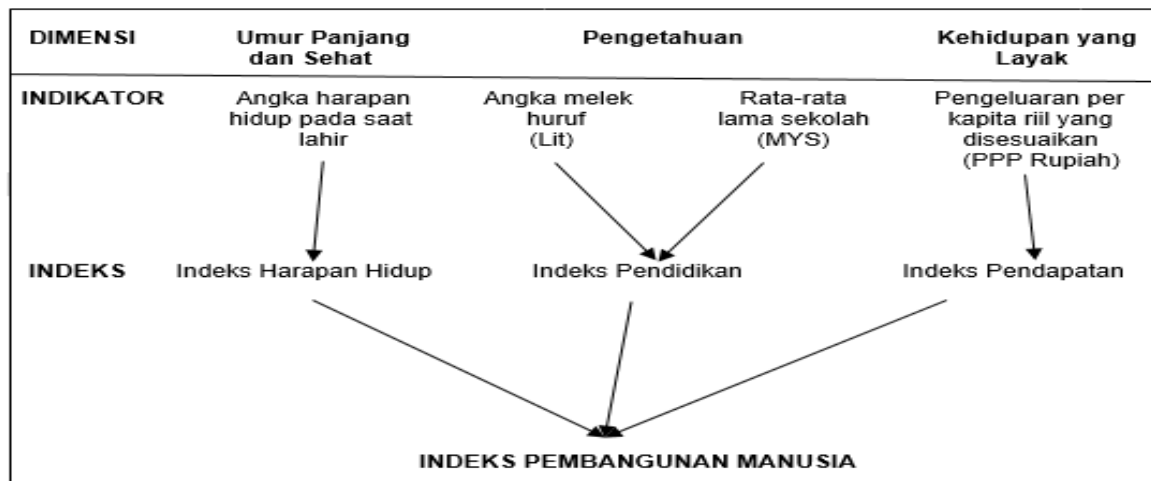
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai IPM menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat, dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Kedudukan dan peran IPM dalam pembangunan akan lebih terlihat kalau dilengkapi dengan suatu data yang berisikan indikator yang relevan dengan IPM dan disusun sebagai suatu system data yang lengkap. System data yang lengkap dan akurat akan lebih dapat mengkaji berbagai kendala dan implementasi program pembangunan pada periode sebelumnya, dan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya, sehingga diharapkan nilai IPM sebagai tolak ukur pembangunan dapat mencerminkan kondisi kemiskinan masyarakat yang sesungguhnya. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencapaian prestasi IPM ini adalah kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kasus tersebut, dan dipihak lain juga kurang nya sosialisasi tentang hal tersebut, sehingga menyebabkan buruknya prestasi kita dikancah internasional, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya indikator-indikator IPM yang belum terpenuhi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur sebuah pencapaian pembangunan manusia yang berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang menggambarkan keempat komponen yakni angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup yang layak (BPS,2015). Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. IPM merupakan indeks komposit atas 3 indeks yaitu:

1. Indeks harapan hidup, sebagai perwujudan dimensi umur panjang dan sehat (longevity)
2. Indeks pendidikan, sebagai perwujudan dimensi pengetahuan (knowledge)
3. Indeks standar hidup layak, sebagai perwujudan dimensi hidup yang layak (decent living)

Gambar 2.1: Diagram Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Indeks harapan hidup menggambarkan berapa banyak tahun yang dapat ditempuh dan dinikmati seseorang selama hidup. Syamsuddin (2012) memaparkan bahwa indeks harapan hidup dapat menggambarkan keadaan dari sebuah sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat di sebuah daerah. Untuk menentukan indeks harapan hidup, UNDP memulai perhitungannya dengan tingkat harapan hidup setelah lahir di negara tersebut dan mengurangnya dengan 25 tahun. Angka 25 tahun adalah patokan tujuan terendah, yakni tingkat harapan hidup paling rendah yang diperkirakan terjadi di semua negara selama generasi sebelumnya. Selanjutnya UNDP membagi hasilnya dengan 85 tahun minus 25 tahun, atau 60 tahun yang menunjukkan kisaran harapan hidup yang diperkirakan dicapai generasi sebelum dan berikutnya. Artinya usia harapan hidup maksimum yang masuk akal yang diperkirakan dapat dicapai generasi mendatang di suatu negara adalah 85 tahun. Besarnya nilai maksimum dan minimum tersebut adalah nilai yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara di dunia) (Todaro, 2009).

Indeks Pendidikan mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dan juga mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari (BPS, 2015) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun keatas. Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk di usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan seperti ini diperlukan supaya angkanya mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum bisa dihitung untuk rata-rata lama sekolahnya. Seperti halnya Angka Harapan Hidup sebagai indikator kesehatan, Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan status keadaan pendidikan suatu masyarakat. BPS (2015) mengemukakan bahwa rendahnya Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitas pendidikan dan biaya pendidikan yang mahal dimana semua itu masih ada hubungannya dengan fenomena kemiskinan.

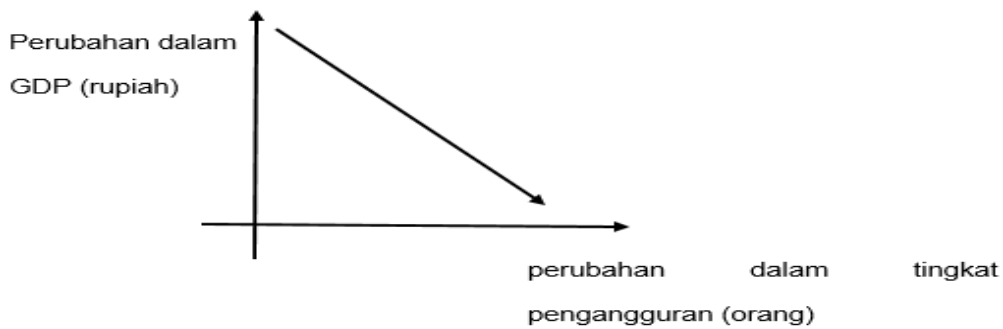
Indeks ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah indeks pendapatan yang merupakan dimensi dari standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.. Kemampuan daya beli ini lebih mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, sangat jauh berbeda dengan PDRB per kapita atau yang dikenal dengan income per capita. Untuk mengukur standar hidup layak, data PDRB per kapita tidak dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka untuk kemampuan daya beli penduduk. Oleh sebab itu, penghitungan daya beli penduduk menggunakan konsumsi per kapita yang kemudian disesuaikan. Sumber data yang digunakan meliputi jumlah pengeluaran per kapita baik konsumsi makanan maupun non makanan.

Hubungan antar variabel

a. Hubungan PDRB dengan Tingkat Pengangguran

Hubungan antara tingkat PDRB yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran diungkapkan oleh George Mankiw. Hal ini didasarkan pada Hukum Okun, yang menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan besarnya PDRB suatu daerah.

Gambar 2.2: Kurva hubungan GDP dengan pengangguran (Hukum Okun)



Sumber: Teori Makro Ekonomi, (Mankiw, 2000)

Seorang ahli ekonomi Okun memperkenalkan Hukum Okun yang menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara tingkat pengangguran dengan GDP riil, dimana terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dengan GDP. Pada kurva Okun terdapat garis sumbu horizontal yang menunjukkan perubahan tingkat pengangguran dan persentase GDP riil pada sumbu vertikal. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perubahan dalam tingkat pengangguran tahun ke tahun sangat erat hubungannya dengan perubahan dalam GDP riil tahun ke tahun. Setiap adanya peningkatan terhadap persentase pengangguran dalam suatu daerah maka hal tersebut akan setara dengan terjadinya penurunan besarnya PDRB sebesar 2 persen. Apabila PDRB suatu daerah turun maka produksinya juga turun, artinya tingkat produksi yang ada di daerah tersebut turun diakibatkan oleh konsumsi yang turun dari masyarakat dan juga tenaga kerja yang digunakan juga akan turun, akibat dari berkurangnya produksi perusahaan.

b. Hubungan UMK dengan Tingkat Pengangguran

Menurut Sukanto dan Karseno (2008) ada 3 hal yang dapat mengubah bentuk fungsi permintaan tenaga kerja, yaitu :

1. Perubahan harga relatif tenaga kerja
2. Perubahan teknologi
3. Perubahan permintaan akan hasil produksi.

Seandainya harga tenaga kerja tetap, sedangkan harga faktor produksi naik, maka upah minimum regional tenaga kerja menjadi lebih rendah, sehingga perusahaan memanfaatkan lebih banyak tenaga kerja sampai fungsi produk fisik tenaga kerja batas sama dengan produk batas faktor produksi yang lain. Perubahan teknologi biasanya akan memperkecil permintaan akan tenaga kerja. Jadi tingkat upah memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap tingkat pengangguran. Pengaruh positifnya yaitu dimana kenaikan tingkat upah akan menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan kenaikan harga produk. Kenaikan harga produk akan mendapat respon negatif dari konsumen sehingga konsumen mengurangi pembelian. Kondisi tersebut menyebabkan produsen mengurangi produksi dan akan berpengaruh terhadap pengurangan jumlah tenaga kerja yang diserap dan pada akhirnya pengangguran akan meningkat. Sedangkan pengaruh negatifnya dapat dilihat dari jumlah penawaran tenaga kerja, dimana kenaikan tingkat upah akan menyebabkan penawaran tenaga kerja meningkat sehingga tingkat pengangguran berkurang.

Pengangguran yang disebabkan oleh kekakuan upah dan penajatan pekerjaan disebut pengangguran structural (*structural unemployment*). Para pekerja tidak dipekerjakan bukan karena mereka aktif mencari pekerjaan yang paling cocok dengan keahlian mereka, tetapi karena ada ketidakcocokan mendasar antara jumlah pekerja yang menginginkan pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Pada tingkat upah berlaku, penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya sehingga para pekerja ini hanya menunggu pekerjaan yang akan tersedia. Ketika upah riil melebihi tingkat ekuilibrium dan penawaran kerja melebihi permintaannya, kita bisa berharap perusahaan menurunkan upah yang mereka bayar. Pengangguran structural muncul karena perusahaan gagal menurunkan upah akibat kelebihan penawaran tenaga kerja. Bagi sebagian besar pekerja, upah minimum ini tidak berpengaruh, karena mereka menikmati upah di atas upah minimum. Bagi sebagian lainnya, terutama yang tidak terdidik dan kurang berpengalaman, upah minimum meningkatkan upah mereka di atas tingkat ekuilibriumnya. Para ekonom percaya bahwa upah minimum memiliki dampak terbesar terhadap pengangguran.

c. Hubungan IPM dengan Tingkat Pengangguran

Todaro (2000) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta

pembangunan yang berkelanjutan. Kualitas Sumberdaya Manusia yang dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia dapat menjadi penyebab terjadinya penduduk miskin. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja yang berimbas pada rendahnya perolehan pendapatan.

Penelitian Terdahulu

Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah dan Pengangguran Terhadap Presentase Penduduk Miskin Di Kabupaten dan Kota Provinsi Bali oleh Cokorda Istri Dian Purnama Yanthi (2015). Tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisis pengaruh pendidikan, tingkat upah, dan tingkat pengangguran terhadap persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Metode yang digunakan adalah dengan cara Wawancara mendalam dari berbagai sumber seperti Dinas Sosial Provinsi Bali dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mengamati, dan melakukan wawancara secara mendalam dengan informan yang berasal dari Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali. Pendidikan dan tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Bali, dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah oleh Whisnu Adhi Saputra (2011). Tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisis pengaruh PDRB, jumlah penduduk, IPM dan pengangguran terhadap Tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Metode yang digunakan dengan cara Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel (pooling data) sebanyak 35 kab / kota di Jawa Tengah selama tahun 2005-2008. Hasil dari penelitian ini Variabel PDRB, Jumlah Penduduk, IPM dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah.

Analisis Pengaruh PDRB, UMK dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011 oleh Roby Cahyadi Kurniawan (2013). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh PDRB, UMK dan tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di kota Malang tahun 1980-2011. Metode yang digunakan dengan cara menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian ini Variabel PDRB, UMK dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam studi ruang lingkup penelitian adalah produk domestik regional bruto, upah minimum kota/kabupaten dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran. Lokasi penelitian berada di Kabupaten dan Kota se Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan secara kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisis statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (tergantung) dan variabel independen (bebas).

Pengumpulan data untuk mendukung penelitian ini diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur dengan cara studi pustaka dan dokumentasi yaitu teknik atau proses untuk memperoleh data dengan jalan mencantat atau merekam data-data yang telah dipublikasikan oleh instansi-instansi terkait. Data berupa salinan (fotocopy) buku yang memuat data yang dibutuhkan yaitu produk domestik regional bruto, upah minimum Kota/Kabupaten, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran di kabupaten/kota di Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2014.

Data panel merupakan data kombinasi antara time series dan cross section, yaitu data dari beberapa individu dalam periode tertentu. Ada beberapa nama lain dari data panel, antara lain pooled data, kombinasi data time series dan cross section, data micropanel, data longitudinal, event history analysis, dan analisis cohort. Regresi data panel lebih tepat digunakan karena untuk mengatasi interkorelasi diantara variabel-variabel bebas yang dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur tahun 2010 – 2014. Data ini merupakan data yang meliputi kumpulan time series dan cross section yaitu berisi 38 kabupaten dan kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dalam kurun waktu selama 5 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik linier berganda (Multiple Regression) untuk data panel. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

Model regresi data panel ini menggunakan variabel terikat tingkat pengangguran (TP), sedangkan variabel bebasnya adalah produk domestik regional bruto (PDRB), upah minimum kota / kabupaten (UMK) dan indeks pembangunan manusia (IPM). Jika dituliskan dalam fungsi matematis, maka formula regresi dari penelitian ini sebagai berikut :

$$TP = f(PDRB, UMK, IPM)$$

Kemudian model tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk log linier melalui transformasi terhadap variabelnya. Transformasi dilakukan dengan melogaritma persamaan diatas, sehingga model persamaan diatas berubah menjadi bentuk linier sebagai berikut :

$$\text{Log (TPit)} = \alpha + \beta_1 \log (\text{PDRBit}) + \beta_2 \log (\text{UMKit}) + \beta_3 \log (\text{IPMit}) + e_{it}$$

Dimana :

- TP = Tingkat Pengangguran
 α = Konstanta
 β_k = elastisitas variabel ke-k, dengan k = 1,2,3
i = kabupaten / kota ke - i (1,2,...,38)
t = tahun pengamatan (2010,2011,2012,2013,2014)
 β_1 = koefisien regresi dari PDRB
 β_2 = koefisien regresi dari UMK
 β_3 = koefisien regresi dari IPM
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto
UM = Upah Minimum kota/kabupaten
IPM = Indek Pembangunan Manusia
e = kesalahan pengganggu (error of term)

Uji signifikansi variabel bebas dilakukan dengan melihat tabel hasil regresi. Jika probabilitasnya di bawah $\alpha = 5\%$ maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Chow (Common Effect Model vs Fixed Effect Model)

Uji Chow (chow test) berfungsi untuk melihat atau menyeleksi model mana yang paling tepat untuk digunakan dalam sebuah analisis regresi data panel dengan membandingkan antara 3 model yang ditawarkan yaitu dengan membandingkan *common effect* model dan *fixed effect* model terlebih dahulu.

Tabel 4.4 : Hasil Uji Chow (Chow Test)

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: DAERAH			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.319642	(37,149)	0.0000
Cross-section Chi-square	227.665304	37	0.0000

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa cross section chi-square yang dihasilkan dari Uji Chow menunjukkan probabilitas sebesar $0,0000 < \alpha$ (5%). Jadi H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dari hasil uji chow ini dapat disimpulkan bahwa model yang dipilih adalah fixed effect model. Common Effect Model merupakan metode analisis dengan pendekatan kuadrat terkecil yang mengasumsikan bahwa tidak ada varians antara tempat dan waktu penelitian, sehingga diasumsikan perilaku antar variabel menjadi sama. Tabel 4.5 adalah hasil regresi dengan menggunakan *Common Effect Model*.

Tabel 4.5 :Hasil Estimasi Common Effect Model

Dependent Variable: TPT?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 01/10/17 Time: 08:08				
Sample: 2010 2014				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 38				
Total pool (balanced) observations: 190				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.292139	0.524261	12.00193	0.0000
PDRB?	-0.204619	0.031052	-6.589464	0.0000
UMK?	0.491185	0.100516	4.886648	0.0000
IPM?	-1.667954	0.284558	-5.861556	0.0000

R-squared	0.741986	Mean dependent var	0.546524
Adjusted R-squared	0.737824	S.D. dependent var	0.230329
S.E. of regression	0.117936	Akaike info criterion	-1.416525
Sum squared resid	2.587047	Schwarz criterion	-1.348166
Log likelihood	138.5698	Hannan-Quinn criter.	-1.388834
F-statistic	178.2966	Durbin-Watson stat	0.548886
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : e-views 6, 2016, (data diolah peneliti)

Berdasarkan hasil uji common effect model diketahui bahwa dari 3 variabel bebas semuanya berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 - 2014. Hasil regresi data panel tersebut akhirnya menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan regresi data panel dengan model yang lain. Dalam Gujarati (2012) mengemukakan bahwa metode analisis regresi data panel menggunakan common effect model memang kurang dapat menggambarkan hubungan antar variabel. Model ini tidak dapat membedakan varians antara silang tempat dan titik waktu karena memiliki intercept yang tetap dan bukan bervariasi secara random (Kuncoro, 2012). Sehingga perlu dilakukan uji dengan menggunakan model lain untuk menganalisis secara lebih detail mengenai hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hausman (Random Effect Model vs Fixed Effect Model)

Uji Hausman (hausman test) adalah uji yang kedua setelah uji chow untuk menentukan model mana yang tepat untuk digunakan. Pada uji chow yang telah dilakukan sebelumnya bahwa model yang tepat digunakan dalam regresi data panel ini adalah fixed effect model, kemudian untuk mendukung hasil dari uji chow tersebut maka dilakukan uji hausman untuk menentukan antara random effect model atau fixed effect model. Dalam uji hausman ini tetap menggunakan tingkat signifikansi $\alpha(5\%)$.

Tabel 4.6 :Hasil Uji Hausman (Hausman Test)

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Pool: DAERAH				
Test cross-section random effects				
Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random		11.296187	3	0.0102
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB?	-1.090088	0.185753	-0.189476	0.0378
UMK?	0.382220	0.695018	0.027671	0.0601
IPM?	-1.482664	1.664465	-0.230827	0.7051

Sumber : e-views 6, 2016, (data diolah peneliti)

Hasil uji hausman menunjukkan tingkat probabilitas cross section random sebesar 0,0102 yang berarti kurang dari tingkat signifikansi $\alpha(5\%)$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berdasarkan hasil uji hausman ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa model analisis regresi data panel yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model.

Tabel 4.7 :Hasil Estimasi Random Effect Model

Dependent Variable: TPT? Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) Date: 01/10/17 Time: 08:08 Sample: 2010 2014 Included observations: 5 Cross-sections included: 38 Total pool (balanced) observations: 190				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.426468	0.509875	14.56527	0.0000
PDRB?	-0.185753	0.049464	-3.755302	0.0002
UMK?	0.695018	0.082237	8.451372	0.0000
IPM?	-1.664465	0.396919	-4.193462	0.0000

Sumber : e-views 6, 2016, (data diolah peneliti)

Hasil Estimasi

Uji chow dan uji hausman telah dilakukan untuk menemukan model analisis terbaik diantara 3 model yang ditawarkan dalam regresi data panel. Berdasarkan uji chow dan uji hausman maka ditetapkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

Dependent Variable: TPT? Method: Pooled Least Squares Date: 01/10/17 Time: 08:08 Sample: 2010 2014 Included observations: 5 Cross-sections included: 38 Total pool (balanced) observations: 190				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.055218	0.887878	10.19871	0.0000
PDRB?	-1.090088	0.438089	-2.488277	0.0139
UMK?	0.382220	0.185564	2.059772	0.0412
IPM?	-1.482664	0.623194	-2.379137	0.0186

Sumber : e-views 6, 2016, (data diolah peneliti)

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan fixed effect model dapat dilihat pada tabel 4.8 maka diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 9,055 - 1,090X_{1it} + 0,382X_{2it} - 1,482X_{3it}$$

Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Pengangguran

Variabel produk domestik regional bruto memiliki probabilitas sebesar 0,00000 lebih kecil dari nilai signifikansi $\alpha(5\%)$ dan mempunyai nilai koefisien negatif (-) yang berarti produk domestik regional bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Dalam ruang lingkup penelitian ini yang dimaksud dengan produk domestik regional bruto adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi suatu wilayah tertentu dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu dari tahun 2010-2014. Kegiatan ekonomi yang dimaksud seperti kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan dan jasa.

Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh negatif dan signifikan yang artinya jika terjadi kenaikan pada produk domestik regional bruto maka akan terjadi penurunan pada tingkat pengangguran terbuka. Sehingga hasil dari penelitian ini sudah sejalan dengan teori makro ekonomi

mankiw yang menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara tingkat pengangguran dengan GDP riil, dimana terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dengan GDP. Pada kurva Okun terdapat garis sumbu horizontal yang menunjukkan perubahan tingkat pengangguran dan persentase GDP riil pada sumbu vertikal. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perubahan dalam tingkat pengangguran tahun ke tahun sangat erat hubungannya dengan perubahan dalam GDP riil tahun ke tahun. Setiap adanya peningkatan terhadap persentase pengangguran dalam suatu daerah maka hal tersebut akan setara dengan terjadinya penurunan besarnya PDRB sebesar 2 persen. Apabila PDRB suatu daerah turun maka produksinya juga turun, artinya tingkat produksi yang ada di daerah tersebut turun diakibatkan oleh konsumsi yang turun dari masyarakat dan juga tenaga kerja yang digunakan juga akan turun, akibat dari berkurangnya produksi perusahaan.

Upah Minimum Kabupaten dan Kota Terhadap Tingkat Pengangguran

Variabel upah minimum kabupaten dan kota memiliki probabilitas sebesar 0,0139 lebih kecil dari nilai signifikansi $\alpha(5\%)$ dan mempunyai nilai koefisien positif (+) yang berarti upah minimum kabupaten dan kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Adanya pengaruh yang positif dan signifikan menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan upah minimum kabupaten dan kota maka akan terjadi kenaikan pula pada tingkat pengangguran.

Tingginya upah minimum Kabupaten/Kota menyebabkan angkatan kerja bersemangat untuk mendaftarkan diri untuk bekerja sehingga jumlah penawaran tenaga kerja yang ada semakin meningkat, padahal disisi lain dengan adanya UMK para pengusaha justru akan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja hal ini dikarenakan para pengusaha harus membayar gaji/ upah para karyawannya diatas UMK yang ditetapkan setiap Kabupaten/Kota masing- masing. Hal inilah yang menjadi pemicu bahwa para pengusaha akan lebih berhati-hati dalam menerima para pekerja dan hanya para pekerja yang memiliki kemampuan yang baik yang akan mereka pilih sehingga banyak para pekerja yang tidak berkualitas yang tidak dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan justru meningkatkan jumlah pengangguran terbuka. Hasil analisis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yaucef Gellab (1998) yang menyatakan bahwa adanya upah minimum akan mengurangi kesempatan kerja yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap naiknya jumlah pengangguran terbuka.

Indek Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran

Variabel indek pembangunan manusia memiliki probabilitas sebesar 0,0186 lebih kecil dari nilai signifikansi $\alpha(5\%)$ dan mempunyai nilai koefisien negatif (-) yang berarti indek pembangunan manusia dan kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Adanya pengaruh yang positif dan signifikan menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan indek pembangunan manusia maka akan terjadi penurunan pula pada tingkat pengangguran. Hal ini sesuai dengan Abbas(2010) bahwa kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja yang diberikan oleh pendidikan pada dasarnya terkait dengan lima hal, yaitu: (1) motive atau penggerak; (2) traits atau kecepatan bereaksi; (3) self concep tatau gambaran diri pribadi; (4) knowledge atau informasi yang diperoleh seseorang pada bidang tertentu; dan (5) skill atau kemampuan melaksanakan tugas secara fisik atau secara mental. Abbas juga menambahkan bahwa tenaga kerja yang berkualitas dan lebih mempunyai kemampuan akan lebih dihargai jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang kurang mampu. Dengan demikian tingginya IPM tenaga kerja memengaruhi tenaga kerja tersebut dalam memperoleh pekerjaan. Apabila nilai IPM tenaga kerja tersebut tinggi maka tenaga kerja tersebut mudah untuk memperoleh pekerjaan. Namun apabila nilai IPM tenaga kerja tersebut rendah maka pekerjaan akan sulit didapat sehingga akan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas tenaga kerja. Apabila tenaga kerja berpendidikan rendah maka akan sulit baginya untuk menemukan pekerjaan. Dengan demikian tingkat pendidikan yang merupakan salah satu indikator dari IPM berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Karena jika tenaga kerja yang berpendidikan rendah akan sulit menemukan pekerjaan sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Produk domestik regional bruto memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran kabupaten dan kota di Jawa Timur tahun 2010-2014. PDRB telah mempengaruhi tingkat pengangguran suatu daerah dikarenakan PDRB sebagai indikator pembangunan ekonomi suatu daerah sehingga tingkat pengangguran suatu daerah bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dimana jika PDRB suatu daerah meningkat maka di daerah tersebut bisa dikatakan tingkat penganggurannya menurun.

2. Upah minimum dalam hal ini upah minimum kabupaten dan kota memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahun 2010-2014. Dalam hal ini pengangguran dikarenakan kenaikan upah jika upah minimum terus dinaikkan akan berpengaruh pada produsen karena produsen pasti akan menambah modal produksi untuk membiayai para buruh. Sehingga untuk mengurangi biaya produksi pabrik melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak jarang pabrik lebih memilih menggunakan mesin modern daripada memperkerjakan buruh karena lebih efisien.
3. Indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran kabupaten dan kota di Jawa Timur tahun 2010-2014. Indeks pembangunan manusia dalam hal ini tingkat pendidikan, tingkat kesehatan adalah hal yang perlu diperhatikan di setiap daerah karena indeks pembangunan manusia dapat menggambarkan keadaan daerah tersebut termasuk dapat mengetahui tingkat pengangguran di daerah tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Jawa Timur. Dengan adanya peningkatan PDRB terhadap penurunan pengangguran, diperlukan suatu usaha untuk mengurangi pengangguran misalnya dengan lebih meningkatkan peran PDRB di berbagai sektor terutama sektor ekonomi yang bersifat padat karya seperti sektor pertanian dan industri-industri berskala kecil, diantaranya dengan mendorong kenaikan investasi melalui suasana yang kondusif dalam memberikan kemudahan prosedur kepada para investor serta meningkatkan sarana dan prasarana di wilayah Jawa Timur salah satunya dengan melakukan perbaikan infrastruktur baik di desa maupun di Kota.
2. Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur sebelum menentukan tingkat Upah minimum kabupaten/kota sebaiknya mengadakan rundungan atau pertemuan terlebih dahulu antara pihak produsen, buruh dan pemerintah untuk mencapai suatu tingkat upah minimum kabupaten/kota yang tidak merugikan pihak buruh dan pihak produsen.
3. Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan memperhatikan indeks pembangunan manusia dalam hal ini adalah memperhatikan tingkat pendidikan atau tingkat kesehatan suatu daerah karena dua hal ini merupakan penentu kesejahteraan suatu daerah. Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk membuat pendidikan gratis atau kesehatan gratis agar masyarakat yang kurang mampu bisa merasakan fasilitas dari pemerintah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, T. (2010). Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal E-Mabis FE-Unimal, Volume 11, Nomor 3.
- Anggrainy, Kholifah. "Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Kesempatan Kerja Dan Investasi (Studi Kasus Pada Kota Malang Periode 2001-2011)". Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, Juli 2013.
- Badan Pusat Statistik. 2004. <www.bps.go.id> . Diakses tanggal 1 Oktober 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2007. <www.bps.go.id> . Diakses tanggal 23 Oktober 2016
- Badan Pusat Statistik. 2016. Jawa Timur Dalam Angka. <<http://jatim.bps.go.id>>. Diakses tanggal 12 Desember 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Keadaan Tenaga Kerja Jawa Timur. <<http://jatim.bps.go.id>>. Diakses tanggal 12 Desember 2016.
- Boediono. 2009. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Cetakan Ketujuh. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Cholili, Fatkhul Mufid. "Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)". Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, Januari 2014.
- Djojohadikusumo, Sumitro, (1994) " Perkembangan Pemikiran: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan". LP3ES, Jakarta.
- Ghella, Youcef. 1998. Minimum wages and youth unemployment.
- Gujarati, Damodar. 2004. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga
- Gujarati, Damodar. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, buku 2, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

- Hajji, Muhammad Shun. "Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Kota Dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011". *Diponegoro Journal Of Ececonomics* Vol. 2, No. 3, 2013.
- Istijanto. 2006. *Riset Sumber Daya Manusia, (Cara Praktis Mendeteksi DimensiDimensi Kerja Karyawan)*. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Jhingan, M. L. "Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan". PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2012.
- Kurniawan, Roby Cahyadi. "Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011". *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*, Januari 2013.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Makroekonomi*. Edisi Keempat. Terjemahan: Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. "Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) Edisi Ketiga". Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 2008.
- Ruliansyah, Denny. 2013. Analisis Hubungan Antara PDRB, Realisasi Investasi, Desentralisasi Fiskal dan Kesempatan Kerja di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda*
- Sagir, H. Soeharsono. "Kapita Selekta Ekonomi Indonesia". Kencana. Jakarta : 2009.
- Sukanto Reksohadiprodjo dan A.R. Karseno. 2008. *Ekonomi Perkotaan Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE.
- Sukirno, Sadono. 1997. "Teori Pengantar Makroekonomi" Jakarta,.
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ketujuh. Jakarta : Erlangga.
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2009. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga
- Widarjono, Agus, 2009. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Kedua, Cetakan Kesatu: Penerbit Ekonisia